



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 145 TAHUN 2025

**TENTANG
ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH YANG DISERAHKAN
KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Pasal 81 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu ditetapkan mengenai arsip yang akan diserahkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip;
 - b. bahwa hasil penilaian Panitia Penyerahan Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tertuang dalam Surat Permohonan Persetujuan Penyerahan Arsip Statis dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis Nomor 4605/KA/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 dan Nomor 1947/KA/09/2025 tanggal 10 September 2025, berkas arsip usul serah yang telah diverifikasi memiliki nilai guna kesejarahan dan berketerangan, berdasarkan

Jadwal Retensi Arsip dan dapat diusulkan untuk diserahkan;

- c. bahwa permohonan penyerahan arsip statis melalui Surat Permohonan Persetujuan Penyerahan Arsip Statis dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/KN.00.02/1647/2025 tanggal 1 September 2025 dan Nomor B/KN.00.02/1743/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Arsip Statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Diserahkan Kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 219 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 104 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 219 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis, Dan Jadwal Retensi Arsip;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyerahkan arsip statis substantif sebanyak 10 (sepuluh) berkas ke Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menghapus berkas arsip sebanyak 10 (sepuluh) berkas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari Daftar Inventaris Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Menugaskan Arsiparis untuk melaksanakan kegiatan penyerahan arsip statis.
- KEEMPAT : Arsiparis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA wajib membuat Laporan Pelaksanaan Penyerahan Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG ARSIP STATIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
DISERAHKAN KEPADA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 145 TAHUN 2025

TANGGAL : 27 OKTOBER 2025

NOMOR	JENIS/URAIAN INFORMASI ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH ARSIP		TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1	Nota Kesepahaman Antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Roni Dwi Susanto) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Hasto Wardoyo)	2019	1 (Satu)	Lembar	Asli	Nomor : 14 Tahun 2019 dan Nomor : 16/SM/G2/2019
2	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Sarah Sadiqa) dengan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (H. Nofrijal) tentang Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2019	5 (Lima)	Lembar	Asli	Nomor : 17 Tahun 2019 dan Nomor : 17/KSM/B3/2019

NOMOR	JENIS/URAIAN INFORMASI ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH ARSIP		TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
3	Nota Kesepahaman Antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Roni Dwi Susanto) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (Suhariyanto) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2019	4 (Empat)	Lembar	Asli	Nomor : 17 Tahun 2019 dan Nomor : 13/KS.M/03-IX/2019
4	Nota Kesepahaman Antara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Hadiyanto) dan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Setya Budi Arijanta) tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 di Luar Kementerian Keuangan Yang Telah Lulus Seleksi Kompetensi Dasar	2019	10 (Sepuluh)	Lembar	Asli	Nomor : MOU-04/SJ/2019 dan Nomor : 19 Tahun 2019
5	Nota Kesepahaman Antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Roni Dwi Susanto) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (Hinsa Siburian) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Untuk Meningkatkan Keamanan Transaksi Elektronik	2019	1 (Satu)	Lembar	Asli	Nomor : 20 Tahun 2019 dan Nomor : PERJ.253/KBSSN/KH 02.01/11/2019
6	Berita Acara Serah Terima Hibah Antara Direktur Grab for Business PT Grab Teknologi Indonesia (Roy Nugroho) dengan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Setya Budi Arijanta) Berupa Barang Senilai Rp 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	2020	2 (Dua)	Lembar	Asli	Nomor : 072/GTI/GFB/CT/XX/2020 dan Nomor : 240 Tahun 2020
7	Perjanjian Hibah Antara Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Setya Budi Arijanta) dengan Managing Director PT Grab Teknologi Indonesia (Neneng Meity Gunadi) tentang Pemberian Hibah Aplikasi Belanja (BELA) Pengadaan	2020	4 (Empat)	Lembar	Asli	Nomor : 48 Tahun 2020 dan Nomor : 049/GT-GFB/CT/V/2020
8	Nota Kesepahaman Antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M. Si. dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Roni Dwi Susanto) tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2020	10 (Sepuluh)	Lembar	Asli	Nomor : NK/36/XX/2020 dan Nomor : 48 Tahun 2020

NOMOR	JENIS/URAIAN INFORMASI ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH ARSIP		TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
9	Nota Kesepahaman Antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah (Roni Dwi Susanto) dan Jaksa Agung Republik Indonesia (Burhanuddin) tentang Keja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2020	4 (Empat)	Lembar	Asli	Nomor : 39 Tahun 2020 dan Nomor : 87 Tahun 2020
10	Laporan Tahunan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012	2012	1 (Satu)	Jilid	Asli	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA